

BAB I

PENDAHULUAN

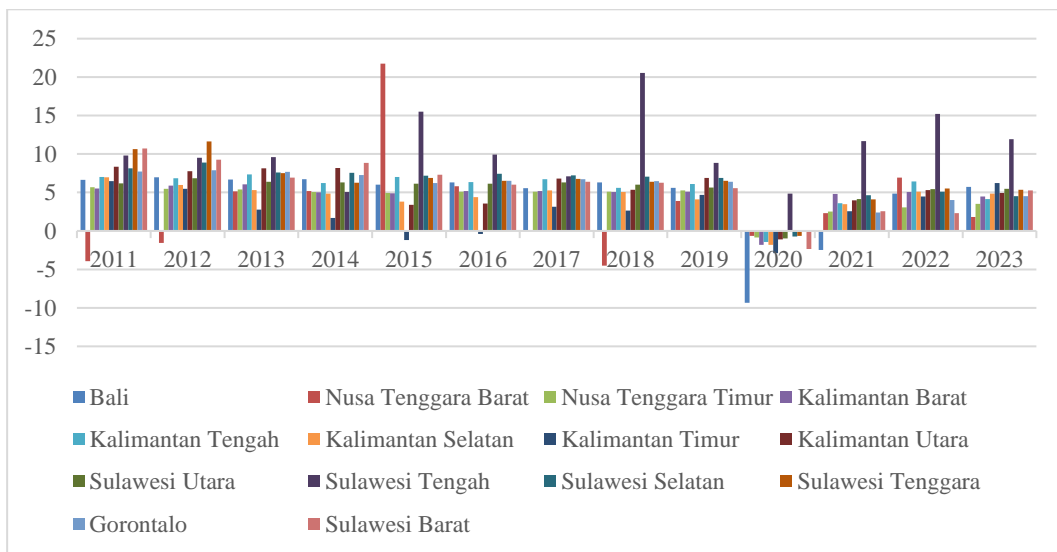
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi dilaksanakan oleh suatu negara dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ekonomi tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan disparitas, dan penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai sebuah proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kepada kondisi perekonomian yang lebih baik pada suatu wilayah (Maulana et al., 2023). Menurut Purba et al. (2024), Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan menuju kondisi perekonomian yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah sering kali mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Falah & Syafri (2023), Indonesia dihadapkan pada ancaman *middle income trap*, yaitu suatu kondisi di mana perekonomian mengalami stagnasi sehingga tidak dapat tumbuh ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Setiap tahunnya, Indonesia hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3-5% saja (Falah & Syafri, 2023). Hal ini bisa terjadi karena kontribusi di tingkat provinsi yang sangat rendah dan tidak merata terutama di wilayah Indonesia tengah, yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Gorontalo. Wilayah ini memiliki peran yang strategis dalam perekonomian karena

berada di tengah Indonesia dan juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, tidak semua provinsi di wilayah ini mampu memanfaatkan potensinya secara optimal. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berikut merupakan data laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia tengah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah)

Gambar 1. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia Tengah
Tahun 2011-2023 (%)

Dari gambar 1.1 dapat terlihat bahwa, pada tahun 2011 sampai 2023 Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi paling besar dan stabil bahkan selama masa pandemi COVID-19. Berbeda dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2011 hingga 2012, di saat provinsi lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, hanya Provinsi NTB yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yaitu -3,31% dan tahun 2012 mencapai -1,54%, ini

disebabkan oleh sektor pertambangan yang mengalami penurunan produksi emas dan tembaga karena perusahaan PT. Newmont sedang dalam fase enam atau mengikis lapisan permukaan, sehingga hanya mengolah cadangan bahan baku yang sudah ada. Walaupun pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 5,16%, Provinsi NTB masih menduduki provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Wilayah Indonesia Tengah (WITA). Pada tahun 2014, NTB mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%.

Tahun 2015 Provinsi NTB mencapai pertumbuhan ekonomi yang melonjak tinggi yaitu 21,76% menduduki provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang disebabkan oleh tingginya produksi pertambangan oleh PT. Newmont yang disertai dengan harga relatif baik dengan penerimaan PDRB sebesar Rp89.337,99 Milyar. Lalu pada tahun berikutnya, turun drastis mencapai 5,81% saja. Kemudian pada periode 2017 sampai 2018, NTB mengalami penurunan yang signifikan, bahkan mencapai -4,5% karena tertundanya izin ekspor konsentrat tembaga dan bencana gempa bumi sehingga membuat Provinsi NTB berturut-turut menduduki provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah se-Indonesia tengah.

Pada tahun 2020 hampir semua provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif karena terkena dampak pandemi COVID-19 termasuk provinsi NTB. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi NTB pulih sebesar 2,3% namun masih menduduki provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah setelah Bali. Sedangkan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi NTB membaik dengan menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,95% yaitu tertinggi kedua setelah Sulawesi Tengah. Namun sayangnya, pada tahun 2023 NTB kembali menjadi provinsi

dengan pertumbuhan ekonomi terendah se-Indonesia tengah bahkan se-Indonesia secara keseluruhan dengan angka 1,8%, hal ini disebabkan karena pertumbuhan sektor pertambangan berkontraksi akibat tidak ada ekspor selama sekitar 4 bulan sejak 1 April sampai dengan 24 Juli 2023. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi NTB sering menduduki provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah se-Indonesia Tengah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih stabil dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memastikan bahwa sumber daya alam, sosial, dan ekonomi tetap terjaga untuk generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan mengembangkan strategi produktivitas di sektor-sektor unggulan. Ada beberapa sektor lapangan usaha yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya: 1) pertanian, kehutanan dan perikanan, 2) pertambangan dan penggalan, 3) industri pengolahan, 4) pengadaan listrik dan gas, 5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 6) konstruksi, 7) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, 8) transportasi dan pergudangan, 9) penyediaan akomodasi dan makan minum, 10) informasi dan komunikasi, 11) jasa keuangan dan asuransi, 12) real estate, 13) jasa perusahaan, 14) administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15) jasa pendidikan, 16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 17) jasa lainnya (BPS, 2025). Setiap sektor tersebut menjadi fondasi penting untuk kemajuan ekonomi regional karena masing-masing sektor tersebut memenuhi

fungsi yang berbeda namun tetap saling terkait sehingga dapat membentuk fondasi yang penting bagi kemajuan regional.

Tabel 1. 1
Kontribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha

Sub Kategori PDRB	[Seri 2010] Kontribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,3	23,31	24,23	23,83	23,85	21,27	21,18	21,95	23,48	22,92	23,18	22,79	21,39	22,23
B. Pertambangan dan	29,19	20,16	14,75	13,36	11,31	22,55	22,52	19,47	13,94	13,49	17,43	17,33	20,37	17,93
C. Industri Pengolahan	4,58	4,84	5	4,89	4,68	3,85	3,87	3,97	4,13	4,12	4,04	4	3,76	3,86
D. Pengadaan Listrik dan	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0,07	0,09	0,09	0,1	0,1	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	8,15	9,04	9,29	9,2	9,44	8,37	8,49	8,85	9,53	10,56	9,09	9,75	9	9,62
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	10,18	11,94	13,28	13,63	14,18	12,27	12,46	13,24	14,5	14,95	14,19	13,99	13,85	14,46
H. Transportasi dan	5,9	6,64	7,28	7,88	8,33	7,24	7,05	7,27	7,52	7,28	4,96	4,99	5,52	5,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,67	1,88	2,16	2,38	2,09	2,15	2,22	2,14	2,03	1,44	1,41	1,64	1,73
J. Informasi dan	1,73	1,96	2,11	2,12	2,12	1,76	1,76	1,86	1,98	1,96	2,2	2,21	2,07	2,09
K. Jasa Keuangan dan	2,12	2,6	3,14	3,37	3,44	3,01	3,18	3,43	3,79	3,65	4,03	4,24	4,13	3,92
L. Real Estate	2,42	2,82	3,14	3,36	3,52	3,03	3	3,06	3,28	3,26	3,28	3,19	3,02	3,01
M, N. Jasa Perusahaan	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,44	6,25	6,62	6,69	7,23	6,27	6	6,01	6,31	6,17	6,57	6,49	6,05	5,89
P. Jasa Pendidikan	3,77	4,54	4,89	5,04	4,98	4,36	4,42	4,59	4,94	5,05	5,16	5,12	4,85	4,91
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71	1,88	1,95	1,99	2,01	1,74	1,72	1,77	1,97	2,02	2,01	2,09	1,94	1,97
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,83	2,05	2,11	2,16	2,17	1,89	1,88	1,99	2,14	2,19	2,09	2,06	2,07	2,13
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

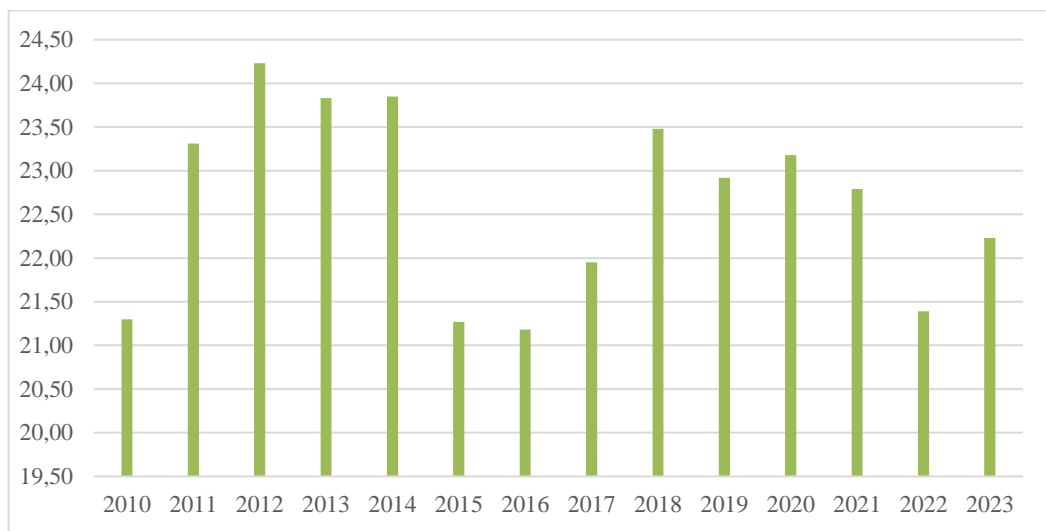
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (diolah)

Indonesia yang dikenal mempunyai sumber daya alam yang melimpah tentunya mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan baik sebagai sumber penghidupan maupun penunjang pertumbuhan ekonomi. Begitupun di Nusa Tenggara Barat, menurut Valentino & Juwita (2023) hasil tipologi *klassen* dengan pendekatan sektoral menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor maju dan tumbuh pesat pertama di NTB. Hal ini terbukti dalam tabel 1.1 di atas bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai kontribusi terbesar di NTB.

Sektor ini menjadi salah satu sektor pendapatan terpenting di Nusa Tenggara Barat karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Menurut Himran & Buhang (2023), sektor pertanian dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan sebuah pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Melalui peningkatan produktivitas dalam sektor ini, pendapatan petani dapat mengalami peningkatan, sehingga memberikan pengaruh yang menguntungkan pada kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, sektor pertanian serta peternakan juga memiliki kesempatan yang cukup besar, untuk bersaing dan berkompetensi dengan produk-produk impor dan ekspor (Amam & Rusdiana, 2021).

Pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan yang merupakan komponen penting dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pertanian di Indonesia juga dalam beberapa dekade telah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun di beberapa daerah, sektor pertanian ini ternyata mengakibatkan degradasi lahan, hal ini dikarenakan adanya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan sehingga dapat mencemari tanah dan pada akhirnya mengancam produktivitas keberlanjutan pertanian yang merupakan komponen penting dalam perekonomian (Wahyunto & Dariah, 2014). Selain itu menurut Rokan Hilir et al. (2014), penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan para nelayan, terjadinya *overfishing* dapat mengurangi stok ikan di laut, sehingga biaya operasional untuk menangkap ikan menjadi lebih tinggi karena nelayan harus melaut lebih jauh atau lebih lama untuk mendapatkan jumlah tangkapan yang sama. Sementara harga ikan di pasaran

cenderung sangat rendah, sehingga hal ini dapat menurunkan pendapatan nelayan. Berikut merupakan data kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan tahun 2018-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (diolah)

Gambar 1. 2

**Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2023 (%)**

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi sektor ini sangat bergantung pada iklim seperti kekeringan ataupun curah hujan yang sangat besar. Pada tahun 2010 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai kontribusi sebesar 21,30%, kemudian tahun 2011 meningkat mencapai 23,31% dan tahun 2012 mencapai 24,23%. Sedangkan pada tahun 2013 hingga 2014 stabil di angka 23,8%. Pada tahun 2015 dan 2016 sektor ini mengalami penurunan dari 21,27% menjadi 21,18% hal ini disebabkan karena tahun 2015 musim panen raya tanaman padi itu terjadi di awal Maret, tapi di tahun 2016 ini justru mundur jadi di

pertengahan April (Radar Lombok, 2016). Lalu pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 21,95%.

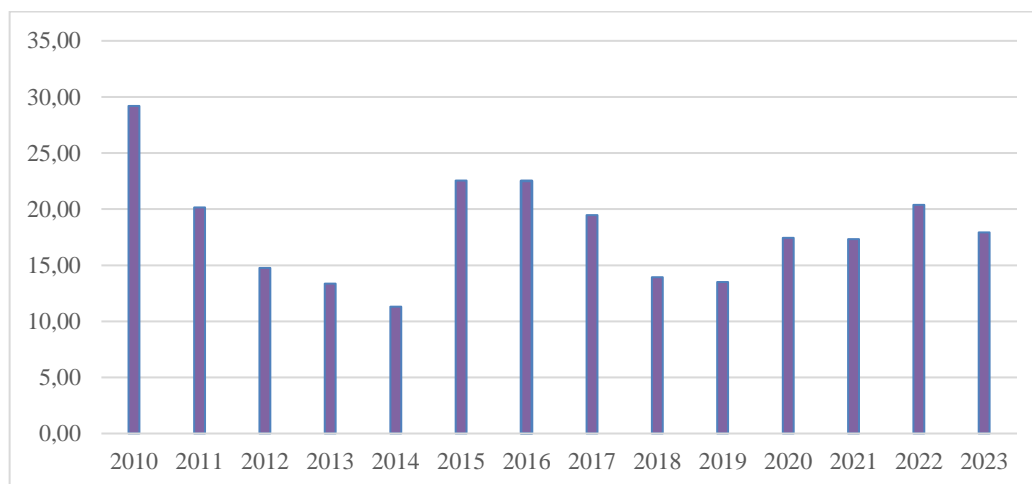
Pada tahun 2018, sektor ini menunjukkan peningkatan sebesar 23,48%. Sedangkan, pada tahun 2019 kembali turun menjadi 22,92%. Lalu, tahun 2020 sektor ini meningkat menjadi 23,18%, kemudian tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 21,39% hal ini disebabkan karena menurut data BPS, di tahun 2022 luas panen padi provinsi NTB berkurang hampir enam ribu hektare. Sebanyak 6 kabupaten/kota di Provinsi NTB yang mengalami penurunan luas panen padi apabila dibandingkan dengan tahun 2021 (Radar Lombok, 2024). Akan tetapi, pada tahun 2023, sektor ini menunjukkan pemulihan dengan mengalami peningkatan nilai sebesar 22,23%.

Sumber pendapatan negara maupun daerah sangat bergantung pada Sumber Daya Alam (SDA). Berlandaskan perhitungan tipologi *klassen*, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor maju dan tumbuh pesat kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di NTB (Valentino & Juwita, 2023). Sektor pertambangan dan penggalian tersebut mencakup aktivitas ekstraksi sumber daya alam seperti emas, batu bara, minyak bumi, gas alam, logam, dan mineral yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nusa Tenggara Barat memiliki 24 perusahaan pertambangan mineral logam yang masih beroperasi dengan izin dari pemerintah pusat dan daerah, dan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia ada di Provinsi NTB, yaitu PT. AMMAN (Azra', 2024). Dengan adanya perusahaan tambang tersebut, tentunya akan

meningkatkan lapangan kerja terutama bagi penduduk sekitar serta dapat meningkatkan penerimaan daerah yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Hal ini sejalan dengan penelitian Hermawan (2014) yang menyatakan, sebagai salah satu faktor produksi, sumber daya alam memang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Sektor pertambangan dan penggalan ini termasuk ke dalam sektor maju dan tumbuh pesat kedua. Akan tetapi, menurut Rahma et al. (2021) ketergantungan yang besar terhadap SDA yang tidak dikelola dengan tepat sering kali berkontribusi terhadap kegagalan pembangunan dan menyebabkan terjadinya fenomena *Natural Resources Curse* yaitu fenomena di mana negara yang kaya akan sumber daya alam tidak selalu mengalami kemakmuran ekonomi. Menurut Auty (1993), ketergantungan negara-negara yang ditelitinya terhadap SDA menyebabkan terjadinya korupsi masif yang disertai terjadinya kemiskinan dan memasukkan negara-negara penghasil SDA tersebut ke dalam kelompok negara miskin. Selain itu menurut Putra A et al. (2015), negara yang memiliki kelimpahan sumber daya alam kecenderungan memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah, hal ini tertuang dalam buku "*Escaping the Resources Curse*" karya Humphreys et al. (2007) dimana negara kaya sumber daya alam seperti Gabon, Kongo, Nigeria, Angola dan Chad berada pada posisi terbawah dalam *human development report* yang dikeluarkan PBB. Berikut merupakan data sektor pertambangan dan penggalan tahun 2010-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (diolah)

Gambar 1. 3

**Kontribusi Sektor Perambangan dan Penggalian Nusa Tenggara Barat
Tahun 2010-2023 (%)**

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa, pada tahun 2010 sampai 2014 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terus mengalami penurunan yang signifikan, di mana pada tahun 2014 kontribusi sektor ini hanya mencapai 11,31%, hal ini disebabkan oleh penurunan produksi emas dan tembaga perusahaan PT. Newmont sedang dalam fase enam atau mengikis lapisan permukaan. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2016 meningkat di angka 22,5%, menurut Global FM Lombok (2015) peningkatan ini disebabkan sejak bulan September 2014 lalu pemerintah memberikan kelonggaran terhadap pelaksanaan UU Minerba berupa diizinkan kembali mengekspor bahan galian atau konsentrat dengan syarat dan ketentuan khusus. Sehingga Newmont kembali meningkatkan produksinya pada tahun 2015 ini. Lalu pada tahun 2017 turun mencapai 19,47%. Menurut Syarwan (2018) turunnya sektor pertambangan tahun 2017 terjadi karena produksi bijih logam dari PT AMNT berkurang. Kemudian Syarwan (2018) juga menyatakan,

melemahnya produksi PT AMNT juga masih terjadi di tahun 2018, ditambah bencana alam gempa bumi yang menghambat sektor pertambangan NTB sehingga kontribusi sektor pertambangan dan penggalian hanya mencapai 13,94%.

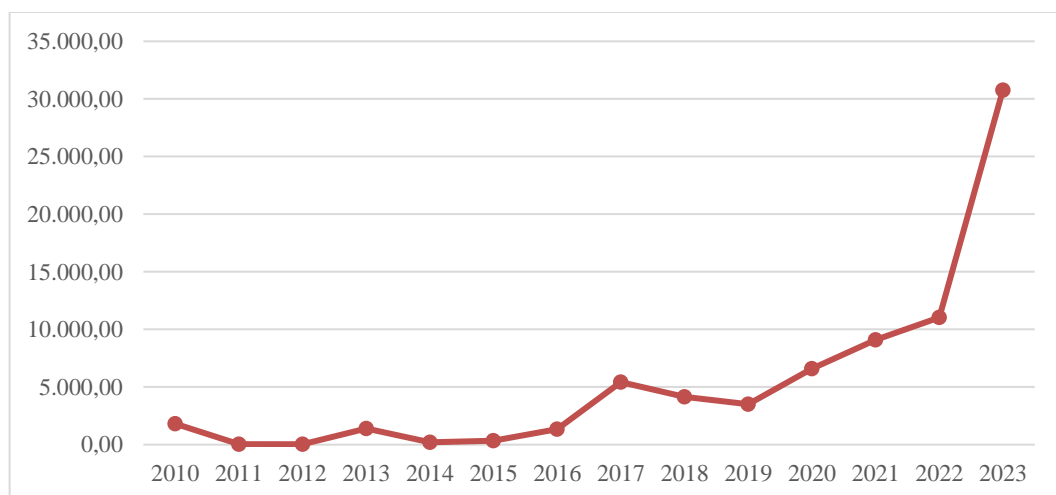
Tahun 2019 semakin turun mencapai 13,49% karena masih terkena dampak gempa bumi. Kemudian meningkat pada tahun 2020 sampai 2021 mencapai angka 17,43% dan 17,33%, menurut Amman (2020), hal ini dikarenakan Tambang Batu Hijau yang dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman) meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, pada tahun 2022 sektor ini mengalami peningkatan sebesar 20,37%, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 17,93% dikarenakan tidak ada kegiatan ekspor pertambangan selama sekitar 4 bulan sejak 1 April sampai dengan 24 Juli 2023.

Faktor yang tak kalah penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Menurut Saputri & Ananda (2023), keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya penanaman modal. Penanaman modal dianggap penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi karena selain mendorong kenaikan *output* yang signifikan, secara otomatis penanaman modal juga akan meningkatkan permintaan *input*, yang nantinya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sependapat dengan penelitian Fahmi & Adriani (2022) yang menyatakan bahwa, investasi merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional.

Provinsi NTB merupakan daerah yang mempunyai daya tarik di bidang pariwisata dengan diraihnya penghargaan *Indonesia's Attractiveness Award* pada

tahun 2019. Penghargaan ini menunjukkan adanya potensi besar untuk menarik minat investor dan pelaku bisnis di berbagai sektor untuk memajukan perekonomian daerah (Yanti et al., 2021). Hal ini terbukti setelah menerima penghargaan tersebut, PMDN di NTB tahun 2020 meningkat sebesar Rp6.582,40 Milyar diikuti dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,95% pada tahun 2021.

Tantangan yang sering muncul mengenai investasi adalah tidak meratanya alokasi PMDN di suatu wilayah. PMDN yang masuk terkadang lebih terkonsentrasi di sektor-sektor atau daerah tertentu, sehingga berdampak buruk pada kelangsungan hidup sektor lain yang sama-sama penting bagi pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini dapat terlihat dalam grafik bahwa pada kenyataannya, pada tahun 2023 ketika PMDN meningkat tajam, pertumbuhan ekonomi NTB turun dari 6,95% menjadi 1,8%. Berikut merupakan data PMDN di Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah)

Gambar 1. 4
Penanaman Modal Dalam Negeri Nusa Tenggara Barat
Tahun 2010-2023 (Milyar Rupiah)

Dari gambar 1.4, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 PMDN berada di angka Rp1.805,80 Milyar. Sedangkan pada tahun 2011 turun mencapai Rp42,3 Milyar. Jika dilihat dari suku bunga, pada tahun 2011 suku bunga (*BI Rate*) mengalami kenaikan dari 6,50% menjadi 6,75% pada bulan Maret 2011, hal ini bisa menjadi alasan mengapa PMDN tahun 2011 turun.

Tahun 2012, PMDN sedikit meningkat mencapai Rp45,4 Milyar dan pada tahun 2013 PMDN meningkat mencapai Rp1.398 Milyar. Menurut Karyawan (2013), keberhasilan pencapaian laju pertumbuhan investasi tersebut tidak lepas dari pada program dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan meliputi: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Tahun 2014, PMDN turun mencapai Rp212,5 Milyar. Lalu, tahun 2015 hingga 2017 PMDN terus mengalami peningkatan mencapai Rp5.413,5 Milyar karena iklim investasi di NTB sedang bagus sehingga tingkat kepercayaan investor meningkat. Namun, tahun 2018 hingga 2019 menunjukkan angka yang menurun sampai mencapai Rp3.519 Milyar yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan regulasi dan kurangnya insentif bagi investor dalam negeri, selain itu menurut Syarwan (2018), gempa bumi yang melanda NTB pada triwulan III tahun 2018 menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi, termasuk investasi. Sedangkan tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan yang stabil sampai pada tahun 2022 mencapai Rp11.031,50 Milyar. Peningkatan PMDN di NTB pada tahun 2020 hingga 2022 dipengaruhi oleh diraihnya penghargaan

Indonesia's Attractiveness Award pada tahun 2019. Penghargaan ini menunjukkan adanya potensi besar untuk menarik minat investor dan pelaku bisnis di berbagai sektor untuk memajukan perekonomian daerah (Yanti et al., 2021).

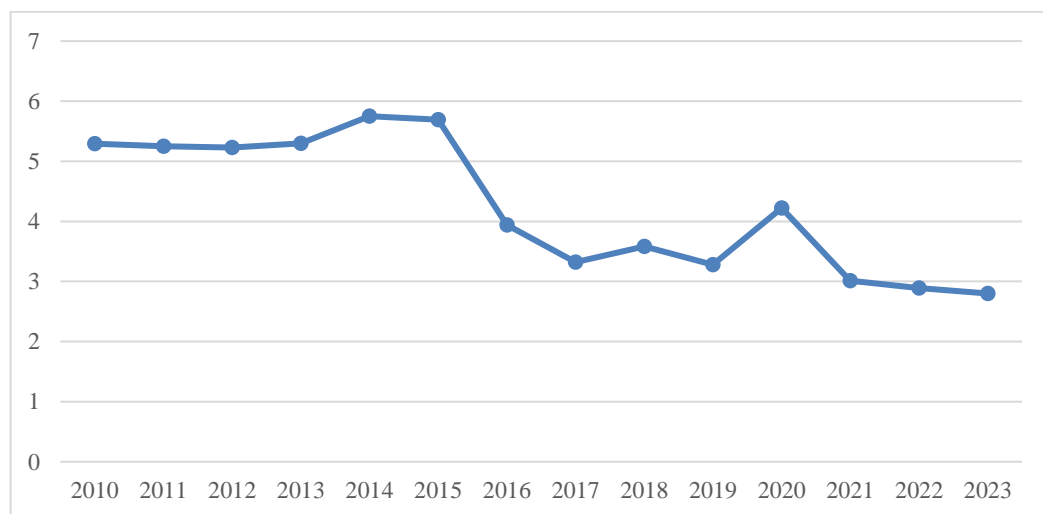
Tahun 2023 PMDN menunjukkan lonjakan yang sangat besar yang mencapai Rp30.766,20 Milyar dikarenakan adanya pembangunan smelter di daerah tambang sehingga menarik investor untuk menanamkan investasinya di NTB. Menurut Firmansyah (2024), peresmian smelter di Kabupaten Sumbawa Barat oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, semakin mengokohkan sektor pertambangan sebagai penopang utama investasi di NTB.

Faktor lain yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengangguran. Menurut Hanifa & Irawan (2022), kemampuan suatu negara untuk tumbuh secara ekonomi sangat dipengaruhi oleh masalah pengangguran di bidang sosial dan ekonomi. Secara umum pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang berusaha mencari pekerjaan (Fatmawati & Guk, 2024).

Tingginya tingkat pengangguran dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan penelitian Doni (2022) yang menyatakan bahwa, semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan turun karena banyaknya jumlah pengangguran tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan produksi sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Tingkat pengangguran di Nusa Tenggara Barat masih menjadi masalah yang aktual dan menjadi fokus utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi. Selama masa pandemi COVID-19, tingkat pengangguran di NTB mengalami peningkatan signifikan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Meskipun tingkat pengangguran pascapandemi telah menurun. Menurut Irawan et al. (2023), pengangguran masih menjadi masalah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena tingginya tingkat pengangguran menunjukkan semakin banyak orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya maka hal ini dapat mendorong individu tersebut melakukan tindakan kriminalitas sebagai upaya untuk bertahan hidup. Berikut merupakan data tingkat pengangguran terbuka tahun 2010-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (diolah)

Gambar 1. 5

Tingkat Pengangguran Terbuka Nusa di Tenggara Barat Tahun 2010-2023 (%)

Dari gambar 1.5, dapat terlihat bahwa pada tahun 2010 hingga 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB stabil di angka 5,2%. Sedangkan pada tahun

2014 meningkat mencapai 5,75% dan tahun 2015 turun mencapai 5,69%. Lalu, pada tahun 2016 hingga 2017, menunjukkan penurunan yang baik mencapai 3,94% dan 3,32%. Menurut Antara NTB (2016), penurunan angka pengangguran tersebut dipengaruhi karena adanya pertumbuhan investasi yang cukup signifikan sehingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, selain itu adanya kebijakan dari pemerintah kota kepada pimpinan perusahaan mengharuskan perusahaan yang berinvestasi di kota Mataram harus menyerap 50% tenaga kerja lokal.

Tahun 2018 TPT sedikit meningkat menjadi 3,58% karena PMDN menurun menjadi Rp4.135,10 Milyar. Selanjutnya, pada tahun 2019 kembali turun menjadi 3,28%. Sedangkan tahun 2020, TPT melonjak naik menjadi 4,22% karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Dan pada tahun 2021 hingga 2023, TPT menunjukkan penurunan yang signifikan hingga mencapai 2,8% pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan kebijakan *lockdown* sudah dicabut dan perusahaan mulai pulih kembali. Azmy (2024), mengatakan penurunan TPT tiga tahun terakhir didukung karena adanya Program PePadu *Plus* (Pelatihan *Plus* Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu, *plus* pendampingan pelatihan produktivitas untuk wira usaha). Program tersebut merupakan inisiatif Disnakertrans NTB untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menjembatani kebutuhan industri dengan lulusan pendidikan vokasi. Program PePadu *Plus* menargetkan lulusan SMK, yang selama ini tercatat memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi NTB sebenarnya berpotensi memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui

sektor unggulannya yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, PMDN, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Namun pada kenyataannya, Provinsi NTB sering menduduki provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Wilayah Indonesia Tengah. Hal ini terbukti bahwa Provinsi NTB menduduki posisi terendah pada tahun 2011, 2012, 2013 (kedua terendah setelah Kalimantan Timur), 2017, 2018, 2019, 2021 (kedua terendah setelah Bali) dan 2023. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural yang signifikan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2023”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, penanaman modal dalam negeri, dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010-2023?
2. Bagaimana pengaruh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, penanaman modal dalam negeri dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari indentifikasi masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, penanaman modal dalam negeri dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, penanaman modal dalam negeri dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan maka didapat manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, penanaman modal dalam negeri, dan tingkat pengangguran terbuka memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan tolak ukur dalam membuat kebijakan terkait sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, penanaman modal dalam negeri, dan tingkat pengangguran terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
- b) Bagi pihak lain seperti akademisi, lembaga non-pemerintah dan investor, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai bagaimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, penanaman modal dalam negeri, dan tingkat pengangguran terbuka dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Tasikmalaya, dengan mengakses website BPS Indonesia, BPS Nusa Tenggara Barat serta website lain yang relevan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan September 2024 dimulai dengan mengajukan judul kepada pihak program studi Ekonomi Pembangunan.

Tabel 1. 2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2024												2025											
		Sep		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Konsultasi dan Pengajuan <i>Outline</i>																								
2	ACC Judul																								
3	Proses Bimbingan untuk Penyusunan Proposal																								
4	Seminar Proposal Skripsi																								
5	Revisi Proposal Skripsi																								
6	Pengumpulan dan Pengolahan Data																								
7	Proses Bimbingan untuk Penyusunan Skripsi																								
8	Sidang Skripsi																								
9	Revisi Skripsi dan Pengesahan Skripsi																								